

ABSTRAK

Saksi mahkota mengakibatkan kedudukan terdakwa menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya, sehingga menyebabkan pro dan kontra. Pengaturan dari saksi mahkota tidak ditemukan dalam aturan umum, melainkan dapat ditemukan dalam peraturan khusus. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana pengaturan mengenai pemeriksaan saksi mahkota berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia; kedua, bagaimana peran saksi mahkota dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dideskripsikan menggunakan metode deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap data primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, sehingga memudahkan penyusunan penulisan hukum ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa pengaturan mengenai saksi mahkota. Saksi mahkota diperbolehkan bilamana pembuktian sulit. Saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan aturan umum dan merugikan terdakwa. Saksi mahkota dapat dilakukan setelah memenuhi syarat tertentu. Hak dan kewajiban terdakwa berubah sementara saat dijadikan sebagai saksi mahkota.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah saksi mahkota dilakukan bilamana terjadinya kebuntuan dalam tindak pidana yang pembuktiannya sulit saja, sehingga cukup diatur secara khusus. Pemeriksaan saksi mahkota harus memperhatikan syarat-syarat suatu perkara tindak pidana dapat ajukan saksi mahkota. Hak dan kewajiban terdakwa yang tercederai karena pemeriksaan saksi mahkota, oleh karena itu diperlukan adanya pemberian peringanan terhadap terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota.

Kata Kunci : Saksi Mahkota; Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Crown witness is used to proving certain crimes that are difficult to solve. Crown witness affects a defendant's position as a witness for other defendants, so that's why it causes some pros cons. There's no crown witness' regulation on common rules, but there are some crown witness' regulations on special rules. The problems of this law research are how is crown witness regulated based on Indonesian Law, and how is crown witness used to prove corruption case based on court sentence number: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

The research methodology that's being used is a normative juridical approach. The result of the research will be described by using an analytical descriptive method. Data sources were obtained by using library research on primary data, secondary data, and tertiary data. All data that's been gathered will be analyzed by using qualitative analysis techniques.

The results of the research that been done, shows some points about the crown witness. Crown witness is used to proving certain crimes that are difficult to solve. Crown witness isn't prohibited, but as small as possible we don't use crown witness. Crown witness will be able to use when some cases fulfill some terms. Defendant's rights dan obligations are changed for a while.

The conclusion is a crown witness is used to prove certain crimes that are difficult to solve, so that's why it needs special rules. We must put attention to crown witness terms before using them. A defendant that used to be crown witness needs some reward.

Keywords: *Crown witness; proofing; corruption.*